

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Banjir telah lama menjadi ancaman serius bagi populasi perkotaan di seluruh dunia, terutama di kota-kota yang berkembang pesat di mana pertumbuhan penduduk dan perluasan infrastruktur sering berbenturan dengan kerentanan alami terhadap perubahan iklim. Bayangkan berbagai belahan dunia, dari New Orleans yang dilanda Badai Katrina hingga Mumbai, yang sering mengalami banjir setiap musim hujan; banjir ini bukan sekadar bencana alam, tetapi juga cerminan ketidakseimbangan antara aspirasi manusia dan batasan lingkungan. Dalam skala global, laporan terbaru dari Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) pada tahun 2022 menekankan bahwa curah hujan ekstrem di wilayah tropis seperti Asia Tenggara diperkirakan akan meningkat sebesar 10-20% pada abad ke-21. Peningkatan ini tidak hanya akan menyebabkan kerugian ekonomi yang mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, tetapi juga akan memperparah ketimpangan sosial, dengan masyarakat miskin yang paling menderita, seringkali kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. (IPCC, 2022)

Indonesia mengalami dinamika serupa akibat perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi yang meningkat pesat. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa antara tahun 2010 dan 2020, Indonesia kehilangan sekitar 1,2 juta hektar hutan primer. (MenLHK, 2021) Hilangnya tutupan lahan ini meningkatkan aliran permukaan dan memperburuk potensi banjir di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta. Sebagai pusat ekonomi nasional, Jakarta mengilustrasikan bagaimana tekanan penduduk, ekspansi properti dan penurunan kualitas lingkungan menjadikan banjir sebagai persoalan multidimensi yang menyangkut aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan politik.

Untuk memahami konteks spesifik banjir di Jakarta, penting untuk mencantumkan pembahasan berita asli yang melaporkan peristiwa banjir

utama selama periode 2013-2017. Berita-berita ini memberikan gambaran langsung tentang intensitas bencana, respons pemerintah, dan kontroversi yang muncul, yang kemudian dapat dianalisis melalui lensa ekologi politik. Berikut adalah rangkuman pembahasan berita asli berdasarkan laporan media terpercaya seperti The Jakarta Post, Kompas, dan BBC, yang mencakup banjir besar pada Januari 2013, serta peristiwa-peristiwa terkait selama masa kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga 2017.

Pada Januari 2013, Jakarta dilanda banjir terburuk dalam beberapa dekade, dengan ketinggian air mencapai 1-2 meter di banyak wilayah, menyebabkan lebih dari 40 orang tewas dan kerugian ekonomi mencapai Rp 2,5 (The Jakarta Pos, 2013). Berdasarkan laporan Kompas (2013), peristiwa banjir besar yang melanda Jakarta dipicu oleh curah hujan ekstrem yang berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Kondisi tersebut diperparah oleh penyempitan alur sungai, khususnya Sungai Ciliwung, yang disebabkan oleh akumulasi sampah serta keberadaan bangunan liar di sepanjang bantaran sungai. Kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia ini menunjukkan lemahnya tata kelola lingkungan perkotaan serta rendahnya efektivitas kebijakan pengendalian banjir pada periode tersebut.

Dalam merespons bencana tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Gubernur Joko Widodo, melakukan langkah-langkah darurat berupa evakuasi massal warga terdampak serta menyampaikan komitmen untuk melakukan normalisasi sungai sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Namun demikian, sejumlah kritik muncul dari berbagai kalangan yang menilai bahwa upaya tersebut bersifat reaktif dan belum didukung oleh tingkat kesiapsiagaan yang memadai. Selain itu, permasalahan terkait alokasi anggaran yang dinilai tidak proporsional turut memperlihatkan lemahnya perencanaan kebijakan penanggulangan bencana secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya, pada Februari 2014, banjir kembali melanda Jakarta dengan intensitas serupa, mempengaruhi lebih dari 100.000 orang dan merusak infrastruktur seperti jalan tol (BBC,

2014). Berita dari The Jakarta Post (2014) menyoroti bahwa curah hujan harian mencapai 200 mm, melebihi kapasitas sistem drainase kota, dan menekankan peran urbanisasi yang tidak terkendali, seperti pembangunan di daerah resapan air. Gubernur baru, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang mulai menjabat pada Oktober 2014, mengumumkan program ambisius seperti normalisasi Sungai Ciliwung dan pembangunan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) untuk mencegah banjir rob, dengan anggaran mencapai Rp 40 triliun (Kompas, 2014). Namun, berita tersebut juga mencatat kontroversi awal, seperti relokasi paksa warga di bantaran sungai tanpa kompensasi yang memadai, yang memicu protes dari masyarakat.

Pada tahun 2015, banjir terjadi beberapa kali, termasuk pada Januari dan November, dengan korban jiwa mencapai 20-30 orang per kejadian dan kerugian infrastruktur yang signifikan (The Jakarta Post, 2015). Berita dari BBC (2015) melaporkan bahwa proyek normalisasi Ciliwung, yang dimulai pada 2010, dipercepat di bawah Ahok, namun diwarnai oleh tuduhan korupsi dan mafia tanah yang menghambat pelaksanaan. Selain itu, berita menyoroti dampak sosial, seperti pengungsian ribuan keluarga miskin dari kampung-kampung di pinggir sungai, yang digantikan oleh proyek properti. Pada Desember 2015, banjir rob di Jakarta Utara menenggelamkan wilayah pesisir, dengan ketinggian air 1 meter, dan berita dari Kompas (2015) mengkritik keterlambatan pembangunan tanggul pantai, sambil mencatat dukungan dari konsorsium internasional seperti Belanda untuk *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD).

Tahun 2016 melihat peningkatan frekuensi banjir, dengan empat kejadian utama, termasuk banjir pada April yang menyebabkan kerugian Rp 1 triliun (The Jakarta Post, 2016). Berita dari BBC (2016) menggambarkan bagaimana hujan monsunial yang lebih ekstrem, dipengaruhi oleh perubahan iklim, diperburuk oleh sedimentasi waduk dan penyempitan kanal. Ahok mendorong reklamasi pantai sebagai bagian dari *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD), namun berita tersebut melaporkan oposisi dari nelayan dan aktivis lingkungan yang khawatir

kehilangan lahan tangkap ikan. Pada November 2016, banjir besar kembali terjadi, dengan air setinggi 1,5 meter, dan Kompas (2016) menyoroti kegagalan sistem pompa air serta tuduhan bahwa proyek besar lebih menguntungkan pengembang daripada masyarakat.

Pada 2017, banjir terjadi pada Januari dan Februari, dengan korban jiwa 60 orang dan kerugian Rp 2 triliun (The Jakarta Post, 2017). Berita dari BBC (2017) mencatat bahwa meskipun *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) sedang dalam tahap perencanaan akhir, banjir rob meningkat akibat kenaikan permukaan laut 5 mm per tahun. Kontroversi mencapai puncak dengan tuduhan korupsi dalam proyek normalisasi, yang melibatkan relokasi paksa dan sengketa lahan, serta kritik terhadap prioritas anggaran yang lebih besar untuk MRT dan reklamasi daripada pencegahan banjir (Kompas, 2017). Periode ini berakhir dengan pemilihan gubernur baru pada April 2017, di mana Ahok kalah, namun warisannya dalam kebijakan banjir tetap menjadi bahan perdebatan.

Dengan demikian, pembahasan berita asli ini menunjukkan pola banjir yang kronis di Jakarta selama 2013-2017, yang tidak hanya disebabkan oleh faktor alam seperti hujan ekstrem dan kenaikan permukaan laut, tetapi juga diperburuk oleh urbanisasi, sedimentasi, dan kegagalan infrastruktur. Berita-berita tersebut sering kali menyoroti respons pemerintah yang reaktif, seperti evakuasi dan janji proyek, namun juga mengungkap kontroversi seperti relokasi paksa, korupsi, dan prioritas ekonomi yang mengabaikan dampak sosial-ekologis. Analisis selanjutnya akan mengkaji berita-berita ini melalui perspektif ekologi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Robbins (2012), yang melihat pengelolaan lingkungan sebagai arena persaingan kekuasaan dan distribusi manfaat.

Dari sudut pandang ekologi politik, seperti diungkapkan oleh Paul Robbins (2012), pengelolaan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari hubungan kekuasaan, distribusi manfaat, dan ketidakadilan yang timbul dari kebijakan. Dalam konteks Jakarta, ketidakadilan ini terlihat jelas pada periode 2013–2017 ketika proyek-proyek besar seperti normalisasi sungai dan NCICD dijalankan secara intensif. Berbagai laporan menunjukkan

bahwa pelaksanaan proyek tersebut sering kali diwarnai dengan sengketa lahan, relokasi yang paksa, serta gesekan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta.

Kerangka hukum sebenarnya telah memberikan pedoman yang jelas. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan perlindungan untuk area rawan banjir dan pentingnya pengelolaan ruang yang berbasis ekosistem. Namun, kenyataannya menunjukkan ketidakadilan dalam pelaksanaannya. Data dari Kementerian Keuangan (2013–2017) menunjukkan bahwa hanya sekitar 5–7% dari anggaran lingkungan yang dialokasikan untuk infrastruktur pencegahan banjir, sedangkan proyek-proyek komersial besar seperti MRT dan reklamasi pantai mendapatkan alokasi yang lebih besar. Ketidakerataan dalam pengalokasian anggaran ini juga mencerminkan bahwa pengelolaan banjir di Jakarta tidak terlepas dari kepentingan ekonomi-politik. (Kemenkeu, 2020)

Peningkatan nilai kerugian ekonomi akibat banjir yang signifikan, dari sekitar Rp20 triliun pada tahun 2013 hingga mencapai kurang lebih Rp100 triliun dalam rentang waktu 2013–2020, menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan dan pesisir, bersifat struktural dan belum tertangani secara tuntas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta keberlanjutan kebijakan pengendalian banjir yang selama ini diterapkan (Kompas.com, 2013). Masyarakat pesisir dan kelompok berpendapatan rendah tetap menjadi pihak yang paling merasakan dampak, namun paling sedikit dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan.

Dengan demikian, perubahan pola banjir di Jakarta perlu dilihat tidak hanya sebagai isu teknis terkait hidrologi, tetapi juga sebagai ruang persaingan kekuasaan dan dominasi ekonomi-politik. Sudut pandang ekologi politik penting untuk mengeksplorasi siapa yang memperoleh keuntungan dari kebijakan penanganan banjir, siapa yang menghadapi risiko, dan bagaimana kebijakan yang dibuat antara tahun 2013 hingga 2017

bisa menimbulkan ketidakadilan baru dalam pengelolaan lingkungan di kota.

Perspektif ini menyoroiti bagaimana politik lingkungan membentuk interaksi di antara berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, pengembang properti, anggota masyarakat, dan lembaga internasional, dalam persaingan mereka untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Jangka waktu ini dipilih karena mencakup transisi politik yang signifikan, dimulai dengan banjir dahsyat pada Januari 2013 yang menjadi katalisator perubahan, hingga periode kontroversial Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang dikenal dengan inisiatif ambisius seperti Tanggul Laut Raksasa.

Fokus utamanya adalah bagaimana kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi warga negara seringkali memperburuk ketidakadilan, di mana kepentingan ekonomi elit seringkali mengesampingkan kebutuhan ekologis dan sosial populasi rentan. Kompleksitas permasalahan ini pada dasarnya bersifat structural banjir bukan sekadar akibat hujan deras, tetapi merupakan indikasi ketidakseimbangan kekuasaan, dimana narasi "pembangunan modern" menyembunyikan agenda korporasi, seperti mengubah daerah resapan air menjadi mal dan apartemen, sementara masyarakat miskin di wilayah pesisir atau pinggiran kota seperti Muara Baru atau Kampung Bahari menjadi korban relokasi paksa.

Argumen ini menyoroiti perlunya perspektif ekologi politik untuk memahami bahwa konflik-konflik ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan akibat dari desain kebijakan yang mengabaikan persimpangan isu-isu lingkungan dengan kelas sosial dan etnisitas. Oleh karena itu, penelitian ini menyerukan dorongan menuju reformasi yang lebih inklusif. Analisis ini didukung oleh data yang andal yang mengungkap pola dan tren yang meresahkan, sehingga memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap faktor-faktor politik yang mendasarinya.

Menurut data BNPB, kejadian banjir di Jakarta telah melonjak dari rata-rata dua kejadian per tahun antara tahun 2000 dan 2010 menjadi empat hingga lima kejadian per tahun antara tahun 2013 dan 2020, yang mengakibatkan total kerugian sekitar Rp 100 triliun dan jumlah korban jiwa

yang konsisten berkisar antara 40 hingga 60 per kejadian. Hal ini menunjukkan tren yang meningkat yang sejalan dengan urbanisasi kepadatan penduduk meningkat dari 14.000 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2010 kemudian menjadi 16.000 jiwa pada tahun 2017, yang berkorelasi langsung dengan alih fungsi 40% lahan hijau menjadi kawasan komersial, mengurangi kapasitas infiltrasi air hingga 30% dan meningkatkan debit banjir sungai-sungai besar seperti Ciliwung hingga 15%. (BNPB,2021)

mengungkap masalah mendasar dimana peningkatan ekspansi perkotaan sebesar 15% setiap dekade didorong oleh kepentingan pengembang, sementara efisiensi waduk menurun sebesar 25% karena sedimen dari limbah industri, sehingga menghasilkan pola di mana banjir tahunan tidak lagi bersifat musiman tetapi kronis. Data terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada tahun 2023 memprediksi bahwa tanpa intervensi, banjir parah dapat terjadi setiap tahun pada tahun 2030, didorong oleh kenaikan permukaan laut sebesar 5-10 mm per tahun, yang memengaruhi 20% wilayah Jakarta Utara, bersama dengan peningkatan curah hujan sebesar 12% yang terkait dengan perubahan pola monsun—hal ini menunjukkan perlunya adaptasi tetapi juga menyoroti bagaimana konflik kepentingan menghambat kemajuan, seperti keterlambatan dalam proyek restorasi yang disebabkan oleh sengketa lahan. (BMKG, 2023)

Analisis data ini menyoroti perlunya investigasi lebih lanjut terhadap tren degradasi ini melalui lensa politik lingkungan, karena statistik tersebut tidak hanya mencerminkan kerugian tetapi juga menunjukkan bagaimana kebijakan telah berjuang untuk mengatasi akar antropogenik, membuka jalan bagi penelitian yang dapat mencegah eskalasi krisis migrasi iklim di wilayah perkotaan. Tinjauan studi-studi sebelumnya mengungkap-kan bahwa, meskipun terdapat kemajuan dalam memahami situasi banjir di Jakarta, perspektif ekologi politik mengenai konflik kepentingan masih kurang dieksplorasi, terutama selama periode politik yang bergejolak dari tahun 2013 hingga 2017. Misalnya, studi dari Eliza Colven (2017) yang diterbitkan dalam *"Environment and Planning D: Society and Space,"* yang

mengkaji kebijakan banjir melalui ekologi politik perkotaan, menemukan bahwa proyek normalisasi Sungai Ciliwung dari tahun 2010 hingga 2015 memperburuk ketimpangan spasial, di mana relokasi paksa ribuan penduduk miskin menguntungkan elit properti dengan kenaikan nilai tanah hingga 200%. Selain itu, diidentifikasi bahwa 60% proyek gagal karena korupsi dan sengketa tanah yang melibatkan mafia tanah, yang pada akhirnya memperburuk segregasi sosial di kota tersebut.

Meskipun mendalam, keterbatasan studi ini antara lain fokus yang sempit pada periode sebelum 2013 dan kurangnya eksplorasi dinamika politik pascapemilu, seperti keterlibatan Ahok dalam audit proyek, serta kurangnya integrasi data dari aktor internasional yang membentuk narasi kebijakan. Rita Padawangi dan Mike Douglass (2015) dalam studi mereka mengenai banjir kronis di Jakarta menekankan pentingnya inisiatif berbasis masyarakat dalam pengelolaan risiko banjir, termasuk program pemantauan lokal, pembersihan saluran drainase, dan pemulihan ekosistem yang dilakukan oleh komunitas terdampak. Mereka mengkritik pendekatan tradisional yang bersifat top-down dan dominasi investasi publik pada proyek infrastruktur besar yang seringkali mengabaikan peran serta masyarakat setempat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan banjir. (Padawangi, 2015)

1.2 Rumusan Masalah

Dalam konteks tata kelola lingkungan perkotaan, kebijakan penanganan banjir melalui program normalisasi sungai di DKI Jakarta menjadi salah satu strategi utama yang diambil pemerintah daerah sejak awal 2010-an. Namun, implementasi kebijakan ini ternyata menimbulkan berbagai persoalan kompleks, bukan hanya secara teknis tetapi juga secara politik dan sosial. Terdapat tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat terdampak yang menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dalam setiap tahap pelaksanaan kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan normalisasi sungai tidak dapat dipahami semata sebagai program teknis infrastruktur, melainkan

sebagai arena pertarungan politik dan ekonomi yang sarat dengan kepentingan aktor-aktor tertentu. Fenomena tersebut mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik, serta menunjukkan lemahnya integrasi antara aspek ekologis dan sosial dalam kebijakan lingkungan perkotaan. Di sinilah urgensi penelitian ini muncul untuk menelaah bagaimana kebijakan lingkungan, khususnya penanggulangan banjir, dapat menjadi instrumen politik yang justru menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

Konflik kepentingan dalam kebijakan normalisasi sungai ini melibatkan beberapa aktor utama yang saling bersaing untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan ruang dan sumber daya. Pertama, pemerintah daerah (seperti Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada periode 2013-2017) dan pemerintah pusat sering kali mendorong proyek ini sebagai bagian dari agenda "pembangunan modern" untuk meningkatkan citra kota dan daya saing ekonomi, namun sering kali mengutamakan kepentingan teknokratik dan infrastruktur besar tanpa partisipasi masyarakat yang memadai. Kedua, sektor swasta, termasuk pengembang properti, konsorsium internasional (seperti yang terlibat dalam NCICD), dan mafia tanah, memperoleh keuntungan ekonomi langsung dari relokasi paksa dan reklamasi lahan, yang meningkatkan nilai properti hingga 200% namun merugikan ekosistem dan masyarakat. Ketiga, masyarakat terdampak, terutama kelompok berpendapatan rendah, nelayan tradisional, dan penduduk pesisir di daerah seperti Muara Baru atau Kampung Bahari, menjadi korban utama dengan kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses ke sumber daya alam, sementara suara mereka sering diabaikan dalam proses kebijakan. Konflik ini diperburuk oleh kurangnya transparansi, korupsi, dan sengketa lahan, yang pada akhirnya memperkuat segregasi sosial dan ketidakadilan ekologis di Jakarta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini mengapa terjadi konflik kepentingan dan bagaimana peran dalam kebijakan penanggulangan banjir DKI Jakarta: Perpektif Ekologi Politik Tahun 2013 – 2017?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disusun untuk memandu arah kajian secara fokus, sistematis, dan mendalam. Setiap pertanyaan dirancang untuk menggali aspek kritis dari konflik kepentingan dan relasi kuasa dalam kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta, sekaligus mencerminkan pendekatan ekologi politik sebagai kerangka analitis utama.

1. Bagaimana konfigurasi relasi kuasa dan peran masing-masing aktor (pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan warga terdampak) dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta?
2. Apa saja bentuk konflik dan pertarungan kepentingan yang muncul dalam kebijakan penanggulangan banjir, serta bagaimana konflik tersebut mempengaruhi efektivitas, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial-ekologis di Jakarta?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan (akademis) maupun dari segi aplikasi praktis di lapangan.

1.4.1 Tujuan Penelitian

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konfigurasi kekuasaan dan kepentingan mempengaruhi proses pengambilan keputusan kebijakan banjir. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bagaimana dominasi aktor tertentu dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya lingkungan dan memperparah kerentanan kelompok masyarakat tertentu. Permasalahan ini sering diabaikan dalam pendekatan teknokratik yang dominan dalam studi-studi sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang sedang dilaksanakan, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat sesuai dengan tujuan penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teorinya, kajian ini memberikan sumbangan pada pengembangan studi ekologi politik dan ilmu kebijakan publik, terutama dalam memahami dinamika kekuasaan serta kepentingan yang mendasari kebijakan lingkungan di wilayah kota. Melalui analisis terhadap kebijakan penanganan banjir di DKI Jakarta, kajian ini mendukung pemikiran yang diajukan oleh Bryant dan Bailey (1997) serta Robyn Eckersley (1992), yang menegaskan bahwa masalah lingkungan tidak pernah lepas dari aspek politik. Sebaliknya, masalah tersebut merupakan dampak dari interaksi antara kekuatan dan kepentingan ekonomi yang saling bersaing.

Selain itu, penelitian ini juga memperluas sudut pandang akademis mengenai bagaimana kebijakan teknokratis, seperti normalisasi sungai, kerap kali menjadi tempat terjadinya konflik antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya pustaka ilmiah dalam bidang ekologi politik perkotaan dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan yang adil secara sosial.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil dalam memahami faktor-faktor politik yang memengaruhi efektivitas kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi

dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan ekologis, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat terdampak, bukan hanya orientasi pembangunan infrastruktur.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga non-pemerintah dan akademisi dalam mendorong tata kelola lingkungan yang lebih inklusif, serta memperkuat kesadaran publik bahwa isu banjir tidak sekadar persoalan teknis, tetapi juga politik dan sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap perbaikan praktik kebijakan publik yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan ekologis masyarakat kota.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai alur pembahasan penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan arah kajian secara keseluruhan. Penulisan ini terdiri dari sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian yang mengemukakan kondisi dan permasalahan banjir di DKI Jakarta sebagai persoalan lingkungan dan kebijakan publik. Pembahasan dimulai dari gambaran umum permasalahan banjir hingga mengarah pada fokus penelitian, yaitu konflik kepentingan dalam kebijakan penanggulangan banjir. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik maupun praktis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, serta membahas teori

dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis. Dalam bab ini diuraikan konsep ekologi politik, konflik kepentingan, serta relasi kuasa dalam kebijakan lingkungan sebagai kerangka teoretis yang digunakan untuk menganalisis kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi geografis dan kerentanan banjir di DKI Jakarta, arah kebijakan penanggulangan banjir pada periode 2013–2017, serta aktor dan kelembagaan yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Selain itu, bab ini juga menguraikan dinamika sosial yang muncul dalam pelaksanaan ke-bijakan penanggulangan banjir sebagai konteks empiris sebelum dilakukan analisis lebih mendalam.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan bagian analisis utama yang membahas temuan penelitian dengan menggunakan perspektif ekologi politik. Pembahasan difokuskan pada relasi kuasa antaraktor, bentuk-bentuk konflik kepentingan dalam kebijakan penanggulangan banjir, serta implikasi ke-bijakan tersebut terhadap keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan di DKI Jakarta.

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan penelitian selanjutnya terkait kebijakan penanggulangan banjir dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan penelitian selanjutnya terkait kebijakan penanggulangan banjir dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

